



BAPENDA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

KERANGKA ACUAN KERJA

**PENAGIHAN PAJAK DAERAH
TAHUN ANGGARAN
2025**

Disiapkan Oleh:

PPTK

Selaku Kabid. Pengendalian & Evaluasi Pendapatan Daerah
H. Giri Agung Lubiantoro, SE, M.Si



ardyka1003@gmail.com



KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan	: 5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
Bidan Urusan	: 5.02 Keuangan
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.24.0000 Badan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi	: Bidang Pengendalian & Evaluasi Pendapatan Daerah
Program	: 5.02.04 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
Kegiatan	: 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah
Sumber Dana	: Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi Kegiatan	: Kota Bontang
Anggaran	: Rp. 372.596.040,00

Bidang Pengendalian & Evaluasi Pendapatan Daerah
Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang
Tahun 2025

A. LATAR BELAKANG

1. Gambaran Umum

Bapenda mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintah bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam rangka pelaksanaan fungsi dimaksud, dalam program kerja yang direncanakan pada tahun 2025 sebagai penjabaran Renstra Bapenda tahun 2021-2026 adalah mengintensifkan upaya penagihan pajak kepada para wajib pajak, kegiatan ini merupakan salah satu penjabaran strategi untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat atas kewajiban pajak yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Melalui kegiatan intensifikasi penagihan ini diharapkan dapat memberikan dampak pada penurunan nilai piutang pajak dan pada sasaran utamanya dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah. Agenda penagihan ini mencakup seluruh sektor pajak daerah baik yang bersifat official maupun self assesment.

Adapun teknis pelaksanaan dalam kegiatan penagihan pajak daerah dimaksud adalah sebagai berikut:

a) Rapat-rapat koordinasi:

- proyeksi kinerja perencanaan piutang pajak daerah;
- komponen data untuk identifikasi dan pemutakhiran subyek & obyek pajak daerah berkala;
- pelaporan dan pembayaran kepatuhan wajib pajak daerah;
- komponen kualitas pelayanan wajib pajak daerah terkait administrasi perpajakan daerah;
- komponen pemeriksaan dan penagihan secara ruti dan aktif penagihan pajak daerah;
- komponen data porporasi karcis dan retribusi daerah bersama OPD terkait;
- rapat prosedur penetapan penagihan piutang pajak daerah;
- Sosialisasi E-Kitiran PBB, Penyampaian SPPT PBB, Sosialisasi Validasi Data PBB dari UGM, & Pajak Kendaraan Bermotor dari Samsat Bontang
- rapat terkait penerapan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Opsen Pajak.

- b) kegiatan lapangan:
 - melaksanakan penagihan bersama instansi internal dan eksternal;
 - melaksanakan penagihan daluwarsa pajak daerah;
 - pelaksana tim koordinasi optimalisasi penagihan pajak daerah;
 - melaksanakan validasi data & penjaringan sistem pemungutan official & self assessment pajak daerah.
- c) koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Provinsi, dan/atau Kabupaten/Kota lain dalam rangka penagihan pajak daerah.
- d) penyediaan sarana kendaraan kelapangan penunjang kegiatan penagihan pajak daerah.
- e) Penyampaian jasa pelayanan umum kitiran PBB.
- f) Dukungan Optimalisasi Opsen PKB & Opsen BBNKB.

2. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- 2) Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah untuk Pasal 9 ayat (9) dasar pengenaan PKB dan Pasal 14 dasar pengenaan BBNKB;
- 3) Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 4) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 7 tahun 2025 tentang Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah;
- 5) Peraturan Daerah Kota Bontang nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Kegiatan Penagihan Pajak Daerah dimaksudkan untuk memastikan bahwa kewajiban pembayaran pajak oleh warga, masyarakat atau badan usaha di daerah dapat dipenuhi sesuai ketentuan, secara keseluruhan pajak mencakup pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

b. Tujuan

- 1) memberikan gambaran memadai mengenai posisi pajak daerah berasal dari tunggakan wajib pajak;
- 2) tersedianya data kontribusi pajak berdasarkan nilai penerimaan;
- 3) tersedianya data jumlah objek pajak berdasarkan kelompok nilai pajak;
- 4) tersedianya data piutang pajak daerah untuk katagori piutang yang masih bisa ditagihkan;
- 5) tersedianya data tervalidasi dan penghapusan pajak daerah katagori piutang yang kadaluarsa dan tidak dapat ditagihkan;
- 6) tersedianya data pengelompokkan berdasarkan wajib pajak atau objek pajak yang memiliki tingkat kepatuhan.
- 7) Tersedianya data kriteria dan strategi penagihan pajak daerah.
- 8) Tersedianya skema tarif dan perhitungan PKB dan BBNKB beserta Opsen

B. RUANG LINGKUP PELAKSANAAN

Ruang llingkup kegiatan penagihan pajak daerah adalah pelaksanaan kegiatan dengan tata cara pelaksanaan sebagai berikut :

1) Metode Pelaksanaan

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan sub kegiatan ini adalah serangkaian proses yang dilaksanakan secara sistematis dengan metode pertemuan yang berbentuk rapat, aktivitas lapangan, sosialisasi, edukasi, koordinasi, konfirmasi dan penyampaian serta validasi dan penjaringan pajak daerah berdasarkan sistem pemungutan official dan self assessment pajak daerah.

2) Tahapan Pelaksanaan

1. kegiatan rapar-rapat akan dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dengan waktu pelaksanaan disesuaikan dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi. Kegiatan ini melibatkan OPD internal dan eksternal yang terkait dengan materi rapat;
2. aktivitas lapangan dilaksanakan berdasarkan sistem pemungutan wajib pajak dan objek pajak (official & self assessment), penagihan pajak, piutang pajak yang aktif dan kadaluarsa pajak daerah serta sosialisasi, edukasi dan literasi pajak daerah;

3. Koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat, provinsi dan/atau kabupaten/kota disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau undangan.
4. Koordinasi dan monitoring pelaksanaan penyampaian kitiran PBB di kelurahan dan Ketua Rukun Tetangga (RT).
5. Kegiatan Opsen PKB dan Opsen BBNKB di wilayah Kota Bontang Bersama Bapenda Provinsi & SAMSAT Bontang.

C. KELUARAN

Terselenggaranya kegiatan penagihan dalam bentuk pelaksanaan rapat-rapat dan aktivitas lapangan yang terdokumentasi dalam bentuk laporan tahun 2025.

D. PELKASANA DAN PENANGGUJAWAB KEGIATAN

1) Pelaksana Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah yang diketahui oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah disetujui oleh Sekretaris Daerah Kota Bontang.

2) Penanggung Jawab

Peanggung jawab sub kegiatan adalah kepala bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah .

3) Penerima Manfaat

Penerima pemanfaat dari sub kegiatan penagihan pajak daerah adalah semua pihak baik dari OPD terkait maupun tidak terkait dan masyarakat Bontang dalam pembangunan dan pelayanan publik.

E. WAKTU/JADWAL PELAKSANAAN

1) Waktu Pelaksanaan Kegiatan

- a) Pelaksanaan rapat-rapat direncanakan pada bulan Januari s/d Desember tahun 2025 pada hari kerja dan/atau waktu yang ditetapkan.
- b) Pelaksanaan aktivitas dilapangan direncanakan pada bulan Januari s/d Desember 2025 pada hari kerja dan/atau waktu yang ditetapkan.
- c) Koordinasi dan konsultasi perjalanan dinas direncanakan pada bulan Maret s/d Juni tahun 2025 yang disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran.

- d) Koordinasi dan monitoring direncanakan pada bulan Januari s/d November tahun 2025 yang disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran,
- e) Kegiatan Opsen PKB dan Opsen BBNKB direncanakan pada bulan Januari s/d Desember tahun 2025.

2) Matrik Jadwal dan Angkas pelaksanaan kegiatan (terlampir)

F. LOKASI KEGIATAN

Kegiatan ini dilaksanakan di Kota Bontang.

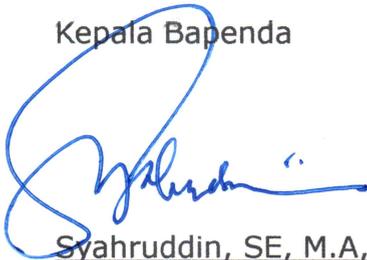
G. ANGGARAN

Anggaran sub kegiatan Penagihan Pajak Daerah sebesar Rp. 372.596.040,00 (Rincian terlampir) melalui Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang.

H. PENUTUP

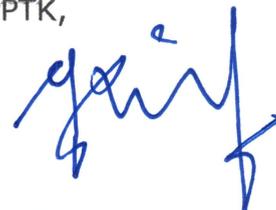
Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai panduan dalam pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025.

Mengetahui,
Kepala Bapenda



Syahrudin, SE, M.A, M.Eng
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197402102005021001

Bontang, 02 Januari 2025
PPTK,



H. Giri Agung Lubiantoro, SE, M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 197509122000121003

JADWAL KEGIATAN PENAGIHAN PAJAK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

URAIAN	JAN					FEB					MAR					APR					MEI					JUN					JUL					AGS					SEP					OKT					NOV					DES				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V					
Sub kegiatan : 5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah																																																												
1	Rapat-rapat koordinasi																																																											
a.	Proyeksi Kinerja Perencanaan Piutang Pajak Daerah																																																											
b.	Komponen Data identifikasi dan pemutakhiran subyek & obyek pajak daerah berkala																																																											
c.	Pelaporan dan pembayaran kepatuhan wajib pajak daerah																																																											
d.	Komponen Kualitas Pelayanan Wajib Pajak Daerah terkait administrasi perpajakan daerah																																																											
e.	Komponen pemeriksaan dan penagihan secara rutin dan aktif penagihan pajak daerah																																																											
f.	Komponen data porporasi karcis dan retribusi daerah bersama OPD terkait																																																											
g.	Rapat Prosedur Penetapan penagihan piutang pajak daerah																																																											
h.	1. Sosialisasi E-Kitiran PBB 2. Penyampaian SPPT PBB 3. Sosialisasi Validasi Data PBB dari UGM 4. Pajak Kendaraan Bermotor dari Samsat Bontang																																																											
j.	Rapat terkait Penerapan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Opsen Pajak																																																											
2	Kegiatan lapangan																																																											
a.	Penagihan Bersama instansi internal dan eksternal																																																											
b.	Tim Koordinasi Optimalisasi Penagihan Pajak Daerah																																																											
c.	Penagihan deluwersa Pajak Daerah																																																											
d.	Validasi Data & Penjarangan Official & Self Assessment Pajak Daerah																																																											
e.	Kegiatan Opsen PKB dan BBNKB																																																											

ANGGARAN KAS BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2025

No	Nama Kegiatan	Pagu					Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jmlh												
Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah																		
1	Air Mineral Spesifikasi : 330 ml	30	Dus	60.868	0%	1.826.040		913.020			913.020							
2	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	350	Orang/kali	24.000	0%	8.400.000			2.400.000		2.400.000			3.600.000				
3	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : Kalimantan Timu	350	Orang/kali	43.000	0%	15.050.000			4.300.000		4.300.000			6.450.000				
4	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	250	Orang/kali	24.000	0%	6.000.000			2.400.000		3.600.000							
5	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : Kalimantan Timu	250	Orang/kali	43.000	0%	10.750.000			4.300.000		6.450.000							
6	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	35.000	Lembar	7.500	0%	262.500.000											262.500.000	
7	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tipe II Spesifikasi : Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	5	Orang	3.567.000	0%	17.835.000			10.701.000		7.134.000							
8	Perjalanan Dinas Luar Daerah Tipe I Spesifikasi : Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	5	Orang	10.047.000	0%	50.235.000			30.141.000		20.094.000							

RENCANA ANGGARAN KAS SIPD-RI TAHUN ANGGARAN 2025

RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA BONTANG TAHUN ANGGARAN 2025				FORMUIR RAK BELANJA											
Urusan	: 5 - Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan														
Bidang Urusan	: 5.02 - Keuangan														
SKPD	: 5.02.0.00.0.00.24.0000 Badan Pendapatan Daerah														
Unit SKPD	: 5.02.0.00.0.00.24.0000 Badan Pendapatan Daerah														
Program	: 5.02.04 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah														
Kegiatan	: 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah														
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah														
Nilai Anggaran	: Rp. 372.596.040														
Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
5.1	BELANJA OPERASI	Rp 372.596.040	Rp 372.596.040	0	913.020	54.242.000	0	0	44.891.020	0	0	10.050.000	0	262.500.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp 372.596.040	Rp 372.596.040	0	913.020	54.242.000	0	0	44.891.020	0	0	10.050.000	0	262.500.000	
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp 42.026.040	Rp 42.026.040	0	913.020	13.400.000	0	0	10.963.020	0	0	10.050.000	0	0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp 42.026.040	Rp 42.026.040	0	913.020	13.400.000	0	0	10.963.020	0	0	10.050.000	0	0	
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	Rp 1.826.040	Rp 1.826.040		913.020				913.020						
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 23.450.000	Rp 23.450.000			6.700.000			6.700.000			10.050.000			
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Rp 16.750.000	Rp 16.750.000			6.700.000			10.050.000						
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Rp 262.500.000	Rp 262.500.000											262.500.000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp 68.070.000	Rp 68.070.000			40.842.000			27.228.000						
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		Rp 372.596.040	Rp 372.596.040	0	913.020	54.242.000	0	0	44.891.020	0	0	10.050.000	0	262.500.000	
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN				55.155.020			44.891.020			10.050.000			262.500.000		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTER				100.046.040						272.550.000					

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Kota Bontang Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.02 KEUANGAN
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.24.0000 Badan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Kegiatan	: 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Pendapatan Asli Daerah Kota Bontang
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 372.596.040,00
Alokasi 2026	: Rp. 50.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Capaian PAD	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 372.596.040,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1 Dokumen
Hasil	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Daerah	100 Persen

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

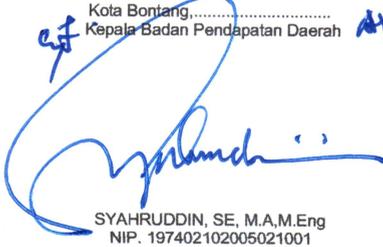
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 372.596.040,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 372.596.040,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 372.596.040,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 42.026.040,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 42.026.040,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp. 1.826.040,00
	[#] Belanja Natura Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.826.040,00
	[-] Natura					Rp. 1.826.040,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Air Mineral Spesifikasi : 330 ml	30	Dus	60.868,00	0 %	Rp. 1.826.040,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 23.450.000,00
	[#] Rapat Koordinasi Monitoring Evaluasi Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 23.450.000,00
	[-] Kudapan/Snack					Rp. 8.400.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	350	Orang / Kali	24.000,00	0 %	Rp. 8.400.000,00
	[-] Makan					Rp. 15.050.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : Kalimantan Timur	350	Orang / Kali	43.000,00	0 %	Rp. 15.050.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 16.750.000,00
	[#] Belanja Konsumsi Aktivitas Lapangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.750.000,00
	[-] Konsumsi Aktivitas Lapangan					Rp. 10.750.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : Kalimantan Timur	250	Orang / Kali	43.000,00	0 %	Rp. 10.750.000,00
	[#] Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.000.000,00
	[-] Kudapan/Snack					Rp. 6.000.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	250	Orang / Kali	24.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 262.500.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 262.500.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp. 262.500.000,00
	[#] Jasa Penyampaian SPPT PBB ke Masyarakat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 262.500.000,00
	[-] Jasa Penyampaian SPPT PBB ke Masyarakat					Rp. 262.500.000,00
	Jasa Penyampaian SPPT PBB ke Masyarakat Spesifikasi : SK Wali Kota Nomor 100.3.3.3/312/BAPENDA/2024	35000	Lembar	7.500,00	0 %	Rp. 262.500.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 68.070.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 68.070.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 68.070.000,00
	[#] Kegiatan Penagihan Pajak Langsung kepada WP Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 68.070.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					Rp. 17.835.000,00
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tipe II Spesifikasi : Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	5	Orang	3.567.000,00	0 %	Rp. 17.835.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah					Rp. 50.235.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Tipe I Spesifikasi : Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	5	Orang	10.047.000,00	0 %	Rp. 50.235.000,00
Jumlah :						Rp. 372.596.040,00

	Kota Bontang..... Kepala Badan Pendapatan Daerah  SYAHRUDDIN, SE, M.A.M.Eng NIP. 197402102005021001
--	---

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				



BAPENDA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

KERANGKA ACUAN KERJA

**PENGENDALIAN, PEMERIKSAAN,
DAN PENGAWASAN PAJAK DAERAH**

**TAHUN ANGGARAN
2025**

DISIAPKAN OLEH:

PPTK

Selaku Kabid. Pengendalian & Evaluasi Pendapatan Daerah
H. Giri Agung Lubiantoro, SE, M.Si



ardyka1003@gmail.com



KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan	: 5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
Bidan Urusan	: 5.02 Keuangan
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.24.0000 Badan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi	: Bidang Pengendalian & Evaluasi Pendapatan Daerah
Program	: 5.02.04 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
Kegiatan	: 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
Sumber Dana	: Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi Kegiatan	: Kota Bontang
Anggaran	: Rp. 237.891.092,00

**Bidang Pengendalian & Evaluasi Pendapatan Daerah
Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang
Tahun 2025**

A. LATAR BELAKANG

1. Gambaran Umum

Bapenda mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintah bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam rangka pelaksanaan fungsi dimaksud, dalam program kerja yang direncanakan pada tahun 2025 sebagai penjabaran Renstra Bapenda tahun 2021-2026 adalah menginsntifkan upaya penagihan pajak kepada para wajib pajak, kegiatan ini merupakan salah satu penjabaran strategi untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat atas kewajiban pajak yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Melalui kegiatan intensifikasi penagihan ini diharapkan dapat memberikan dampak pada penurunan nilai piutang pajak dan pada sasaran utamanya dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah. Agenda penagihan ini mencakup seluruh sektor pajak daerah baik yang bersifat official maupun self assesment.

Adapun teknis pelaksanaan dalam kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah dimaksud adalah sebagai berikut:

- a) Workshop pengelolaan pajak daerah.
- b) kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan lapangan:
 1. Kegiatan Pengendalian :
 - ✓ Penyampaian SKPD;
 - ✓ Sosialisasi dan Penyuluhan Pajak Daerah;
 - ✓ Uji Potensi Pajak Daerah.
 2. Kegiatan Pemeriksaan :
 - ✓ Penyampaian Pemberitahuan Pemeriksaan;
 - ✓ Komfirmasi Pajak Daerah ke WP;
 - ✓ Verifikasi Sumber Data, Audit Pajak dan Pemeriksaan langsung wajib pajak untuk data pajak yang dilaporkan.
 3. Kegiatan Pengawasan :
 - ✓ Pemantauan Kepatuhan Pajak Daerah;

- ✓ Penyuluhan dan Edukasi kepada masyarakat untuk mendorong kepatuhan pajak.
- c) Koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat, Provinsi, dan/atau Kabupaten/Kota lain dalam rangka penagihan pajak daerah.
- d) penyediaan cetak spanduk, cetak poster, stiker, & roll banner kegiatan penagihan pajak daerah.
- e) Rapat Koordinasi Evaluasi dan Pengawasan bersama Walikota Bontang & instansi terkait.

2. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- 2) Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
- 3) Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 4) Peraturan Daerah Kota Bontang nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

- ✓ Pengendalian pajak daerah adalah langkah-langkah yang diambil untuk memastikan bahwa seluruh proses pemungutan dan pengelolaan pajak daerah berjalan secara efektif dan efisien;
- ✓ Pemeriksaan pajak daerah dilakukan untuk memverifikasi kebenaran informasi yang dilaporkan oleh wajib pajak dan untuk memastikan bahwa pajak yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- ✓ Pengawasan pajak daerah adalah kegiatan yang dilakukan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Tujuan

- 1) Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak daerah;
- 2) Mencegah terjadinya kebocoran penerimaan pajak;
- 3) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pajak yang berujung pada optimalisasi penerimaan daerah;
- 4) Memeriksa kewajiban pajak yang telah dilaporkan oleh wajib pajak, baik melalui SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) maupun dokumen lainnya;
- 5) Pengawasan terhadap aparat pajak daerah untuk mencegah potensi korupsi atau penyalahgunaan wewenang dalam pengumpulan pajak.

B. RUANG LINGKUP PELAKSANAAN

Ruang lingkup kegiatan pengendalian, pemeriksaan, dan pengawasan pajak daerah adalah pelaksanaan kegiatan dengan tata cara pelaksanaan sebagai berikut :

1) Metode Pelaksanaan

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan sub kegiatan ini adalah serangkaian proses yang dilaksanakan secara sistematis dengan metode pertemuan dalam kelas dan aktivitas lapangan, sosialisasi, edukasi, konfirmasi dan pemeriksaan serta pengawasan pajak daerah berdasarkan sistem pemungutan official dan self assessment pajak daerah.

2) Tahapan Pelaksanaan

1. kegiatan Bimtek Pemeriksaan akan dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) hari dengan waktu pelaksanaan disesuaikan dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi. Kegiatan ini melibatkan internal OPD Bapenda dan narasumber lokal Bontang;
2. aktivitas lapangan dilaksanakan berdasarkan sistem pemungutan wajib pajak dan objek pajak (official & self assessment),

pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah serta sosialisasi, edukasi dan literasi pajak daerah melibatkan instansi vertikal dan OPD terkait;

3. Koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat, provinsi dan/atau kabupaten/kota disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau undangan.

C. KELURAN

Terselenggaranya kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan dalam bentuk pelatihan dalam kelas dan aktivitas lapangan yang terdokumentasi dalam bentuk laporan tahun 2025.

D. PELKASANA DAN PENANGGUJAWAB KEGIATAN

1) Pelaksana Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah yang diketahui oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah disetujui oleh Sekretaris Daerah Kota Bontang.

2) Penanggung Jawab

Peanggung jawab sub kegiatan adalah kepala bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah .

3) Penerima Manfaat

Penerima pemanfaat dari sub kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah adalah dari pihak masyarakat, warga atau wajib pajak Bontang dalam pembangunan dan pelayanan publik.

E. WAKTU/JADWAL PELAKSANAAN

1) Waktu Pelaksanaan Kegiatan

- a) Pelaksanaan Bimtek direncanakan pada bulan Februari tahun 2025 pada hari kerja dan/atau waktu yang ditetapkan.
- b) Pelaksanaan aktivitas dilapangan direncanakan pada bulan Januari s/d Desember 2025 pada hari kerja dan/atau waktu yang ditetapkan.

c) Koordinasi dan konsultasi direncanakan pada bulan Maret s/d September tahun 2025 yang disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran.

2) Matrik Jadwal dan Angkas pelaksanaan kegiatan (terlampir)

F. LOKASI KEGIATAN

Kegiatan ini dilaksanakan di Kota Bontang.

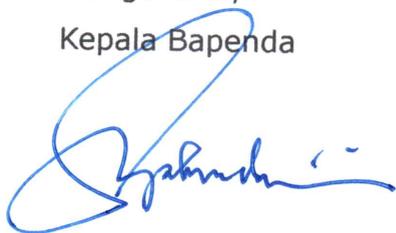
G. ANGGARAN

Anggaran sub kegiatan Penagihan Pajak Daerah sebesar Rp. 237.891.092,00 (Rincian terlampir) melalui Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang.

H. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai panduan dalam pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025.

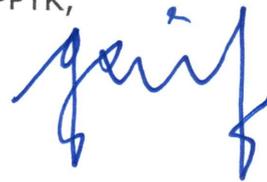
Mengetahui,
Kepala Bapenda



Syahrudin, SE, M.A, M.Eng
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197402102005021001

Bontang, 02 Januari 2025

PPTK,



H. Giri Agung Lubiantoro, SE, M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 197509122000121003

JADWAL KEGIATAN PENGENDALIAN, PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN PAJAK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

URAIAN	JAN					FEB					MAR					APR					MEI					JUN					JUL					AGS					SEP					OKT					NOV					DES				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V										
	Sub kegiatan : 5.02.04.2.01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																																																											
1	Rapat Koordinasi Evaluasi dan Pengawasan bersama Walikota & Instansi terkait																																																											
	a Narasumber/Pembahas setingkat Kepala Daerah																																																											
	b Pembawa Acara																																																											
2	Workshop Pengelolaan Pajak Daerah																																																											
	- Rapat atau Pertemuan Di Luar (Half Day)																																																											
3	Kegiatan Lapangan Tim Pengendalian, pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																																																											
	a Pengendalian Pajak Daerah (Penerimaan)																																																											
	- Penyampaian SKPD																																																											
	- Penyuluhan Pajak Daerah																																																											
	- Uji Potensi Pajak Daerah																																																											
	b Pemeriksaan Pajak Daerah (indikasi ketidakbenaran) KKP, LHP																																																											
	- Penyampaian Pemberitahuan Pemeriksaan																																																											
	- Komfirmasi Pajak Daerah ke WPP																																																											
	- Verifikasi Sumber Data, Audit Pajak dan Pemeriksaan langsung wajib pajak untuk data pajak yang dilaporkan																																																											
	c Pengawasan Pajak Daerah (Pembayaran Tepat Waktu)																																																											
	- Pemantauan Kepatuhan Pajak Daerah																																																											
	- Penyuluhan dan Edukasi kepada masyarakat untuk mendorong kepatuhan pajak																																																											
4	Dialog Interaktif televisi lokal																																																											
	- Pejabat dan Staf menjadi narasumber terkait pajak daerah																																																											

ANGGARAN KAS BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2025

No	Nama Kegiatan	Pagu				Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN												
Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																	
1	Cetak Dokumen/laporan Spesifikasi : Kertas A4 80 gr, Desain Cover, Hard Cover	20	Buku	121.736	0%	2.434.720					2.434.720						
2	Cetak Spanduk Spesifikasi : Custom	20	Paket	423.639	0%	8.472.780		6.354.585			2.118.195						
3	Cetak Poster Spesifikasi : Uk. 48 x 32 Cm	200	Lembar	58.100	0%	11.620.000		5.810.000			5.810.000						
4	Stiker Spesifikasi : Ukuran A3 Stiker Vinyl Gloss, Full Color Laminasi	150	Lembar	38.348	0%	5.752.200		3.067.840			2.684.360						
	Roll Banner Spesifikasi : Bahan Cetak Spanduk ukuran 60 x 160 cm	24	Set	547.808		13.147.392		7.669.312			4.930.272						
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	150	Orang Kali	24.000		3.600.000		3.600.000									
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : Kalimantan Timur	150	Orang kali	43.000		6.450.000		6.450.000									
6	Biaya Konsumsi Aktivitas Lapangan (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	800	Orang/kali	24.000	0%	19.200.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.200.000		
7	Biaya Konsumsi Aktivitas Lapangan (Makan) Spesifikasi : Kalimantan Timur	800	Orang/kali	43.000	0%	34.400.000	3.225.000	3.225.000	3.225.000	3.225.000	3.225.000	3.225.000	3.225.000	3.225.000	2.150.000		
8	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II yang distetarkan	8	Orang/Jam	900.000	0%	7.200.000		7.200.000									
9	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / ...	1	Orang/Jam	1.400.000	0%	1.400.000		1.400.000									
10	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : Pembawa Acara	1	Orang/Kegiatan	400.000	0%	400.000		400.000			400.000						
11	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	24	Orang/kali	750.000	0%	18.000.000					18.000.000						
12	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Pangerah	5	Orang/kali	1.500.000	0%	7.500.000					7.500.000						
15	Biaya tayang video iklan Spesifikasi : Televisi daerah lokal ; durasi 1x layar maksimal Dialog Interaktif	49	Per Tayang	156.000	0%	7.644.000	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000	624.000		
16	Spesifikasi : Televisi Lokal ; durasi 60 menit	2	Per Tayang	6.000.000	0%	12.000.000		6.000.000			6.000.000						
17	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	1	Orang/Bulan	1.210.000	0%	1.210.000									1.210.000		
18	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Honorarium Bagi Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	1	Orang/Bulan	680.000	0%	680.000									680.000		
19	Perjalanan Dinas Luar Daerah Tipe I Spesifikasi : Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	5	Orang	10.047.000	0%	50.235.000		30.141.000			20.094.000						
20	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tipe II Spesifikasi : Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	5	Orang	3.567.000	0%	17.835.000		10.701.000			7.134.000						
	Belanja Uang Transportasi Dalam Kota Spesifikasi : Uang Transportasi dalam Kota	50	Orang/Hari	50.000		2.500.000		2.500.000									
21	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Eselon II (Half Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	30	Orang/Kali	207.000	0%	6.210.000		4.000.000			2.210.000						

RENCANA ANGGARAN KAS SIPD-RI TAHUN ANGGARAN 2025

RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA BONTANG TAHUN ANGGARAN 2025										FORMULIR RAK BELANJA					
Urusan	: 5 - Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan														
Bidang Urusan	: 5.02 - Keuangan														
SKPD	: 5.02.0.00.0.00.24.0000 Badan Pendapatan Daerah														
Unit SKPD	: 5.02.0.00.0.00.24.0000 Badan Pendapatan Daerah														
Program	: 5.02.04 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah														
Kegiatan	: 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah														
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
Nilai Anggaran	: Rp. 237.891.092														
Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
5.1	BELANJA OPERASI	Rp 237.891.092	Rp 237.891.092	5.805.000	5.805.000	100.065.817	5.805.000	5.805.000	86.301.275	5.805.000	5.805.000	5.805.000	5.649.000	5.240.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp 237.891.092	Rp 237.891.092	5.805.000	5.805.000	100.065.817	5.805.000	5.805.000	86.301.275	5.805.000	5.805.000	5.805.000	5.649.000	5.240.000	
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp 105.077.092	Rp 105.077.092	5.025.000	5.025.000	37.644.817	5.025.000	5.025.000	23.882.275	5.025.000	5.025.000	5.025.000	5.025.000	3.350.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp 105.077.092	Rp 105.077.092	5.025.000	5.025.000	37.644.817	5.025.000	5.025.000	23.882.275	5.025.000	5.025.000	5.025.000	5.025.000	3.350.000	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp 41.427.092	Rp 41.427.092			22.569.817			18.857.275						
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 10.050.000	Rp 10.050.000			10.050.000									
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Rp 53.600.000	Rp 53.600.000	5.025.000	5.025.000	5.025.000	5.025.000	5.025.000	5.025.000	5.025.000	5.025.000	5.025.000	5.025.000	3.350.000	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp 9.000.000	Rp 9.000.000			9.000.000									
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp 25.500.000	Rp 25.500.000						25.500.000						
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	Rp 19.644.000	Rp 19.644.000	780.000	780.000	6.780.000	780.000	780.000	6.780.000	780.000	780.000	780.000	624.000		
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp 1.210.000	Rp 1.210.000											1.210.000	
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp 680.000	Rp 680.000											680.000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp 68.070.000	Rp 68.070.000			40.141.000			27.929.000						
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000			2.500.000									
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Rp 6.210.000	Rp 6.210.000			4.000.000			2.210.000						
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		Rp 237.891.092	Rp 237.891.092	5.805.000	5.805.000	100.065.817	5.805.000	5.805.000	86.301.275	5.805.000	5.805.000	5.805.000	5.649.000	5.240.000	
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PERTRIWULAN		Rp 237.891.092	Rp 237.891.092	111.675.817			97.911.275			17.415.000			10.889.000		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTER		Rp 237.891.092	Rp 237.891.092	209.587.092						28.304.000					

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Kota Bontang Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.02 KEUANGAN
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.24.0000 Badan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Kegiatan	: 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Pendapatan Asli Daerah Kota Bontang
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 237.891.092,00
Alokasi 2026	: Rp. 200.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Capaian PAD	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 237.891.092,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	4 Dokumen
Hasil	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Daerah	100 Persen

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 237.891.092,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 237.891.092,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 237.891.092,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 105.077.092,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 105.077.092,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 41.427.092,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.434.720,00

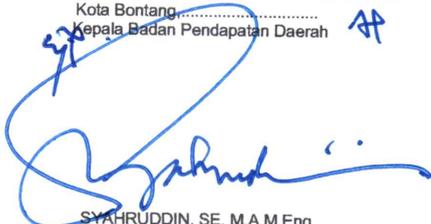
**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Buku					Rp. 2.434.720,00
	Cetak Dokumen/laporan Spesifikasi : Kertas A4 80 gr, Desain Cover, Hard Cover	20	Buku	121.736,00	0 %	Rp. 2.434.720,00
	[#] Belanja Cetak Spanduk Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 8.472.780,00
	[-] Cetak Spanduk Kegiatan					Rp. 8.472.780,00
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Custom	20	Paket	423.639,00	0 %	Rp. 8.472.780,00
	[#] Belanja Poster Hibauan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 11.620.000,00
	[-] Poster Hibauan					Rp. 11.620.000,00
	Cetak Poster Spesifikasi : Uk. 48 x 32 Cm	200	Lembar	58.100,00	0 %	Rp. 11.620.000,00
	[#] Belanja Stiker Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.752.200,00
	[-] Stiker					Rp. 5.752.200,00
	Stiker Spesifikasi : Ukuran A3 Stiker Vinyl Gloss, Full Color Laminasi ...	150	Lembar	38.348,00	0 %	Rp. 5.752.200,00
	[#] Roll Banner Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 13.147.392,00
	[-] Roll Banner					Rp. 13.147.392,00
	Roll Banner Spesifikasi : Bahan Cetak Spanduk ukuran 60 x 160 cm	24	Set	547.808,00	0 %	Rp. 13.147.392,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 10.050.000,00
	[#] Rapat Koordinasi Evaluasi dan Pengawasan PDRD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.050.000,00
	[-] Kudapan/Snack					Rp. 3.600.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	150	Orang / Kali	24.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00
	[-] Makan					Rp. 6.450.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : Kalimantan Timur	150	Orang / Kali	43.000,00	0 %	Rp. 6.450.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 53.600.000,00
	[#] Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 53.600.000,00
	[-] Kudapan/Snack					Rp. 19.200.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	800	Orang / Kali	24.000,00	0 %	Rp. 19.200.000,00
	[-] Makan					Rp. 34.400.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : Kalimantan Timur	800	Orang / Kali	43.000,00	0 %	Rp. 34.400.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 56.034.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 56.034.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 9.000.000,00
	[#] Narasumber Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.200.000,00
	[-] Narasumber					Rp. 7.200.000,00
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	8	Orang / Jam	900.000,00	0 %	Rp. 7.200.000,00
	[#] Rapat Koordinasi Evaluasi dan Pengawasan PDRD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.800.000,00
	[-] Keynote Speaker					Rp. 1.400.000,00
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / ...	1	Orang / Jam	1.400.000,00	0 %	Rp. 1.400.000,00
	[-] MC					Rp. 400.000,00
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : Pembawa Acara	1	Orang / Kegiatan	400.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 25.500.000,00
	[#] Tim Pengendalian dan Evaluasi Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 25.500.000,00
	[-] Tim Pengendalian dan Evaluasi Pajak Daerah					Rp. 25.500.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	24	Orang / Kali	750.000,00	0 %	Rp. 18.000.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Pengarah	5	Orang / Kali	1.500.000,00	0 %	Rp. 7.500.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp. 19.644.000,00
	[#] Belanja Tayang Video Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.644.000,00
	[-] Video Tayang					Rp. 7.644.000,00
	biaya tayang video iklan Spesifikasi : Televisi daerah lokal ; durasi 1x tayang maksimal ...	49	Per Tayang	156.000,00	0 %	Rp. 7.644.000,00
	[#] Biaya Dialog Interaktif Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 12.000.000,00
	[-] Dialog Interaktif					Rp. 12.000.000,00
	Dialog interaktif Spesifikasi : Televisi Lokal ; durasi 60 menit	2	Per Tayang	6.000.000,00	0 %	Rp. 12.000.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 1.210.000,00
	[#] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.210.000,00
	[-] PPTK					Rp. 1.210.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp 250 jut...	1	Orang / Bulan	1.210.000,00	0 %	Rp. 1.210.000,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 680.000,00
	[#] Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 680.000,00
	[-] PPBJ					Rp. 680.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Honorarium Bagi Pejabat Pengadaan Barang/Jasa deng...	1	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 680.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 76.780.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 76.780.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 68.070.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 50.235.000,00
	[-] Perjalanan Dinas					Rp. 50.235.000,00
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Tipe I Spesifikasi : Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	5	Orang	10.047.000,00	0 %	Rp. 50.235.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 17.835.000,00
	[-] Biaya Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 17.835.000,00
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tipe II Spesifikasi : Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	5	Orang	3.567.000,00	0 %	Rp. 17.835.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 2.500.000,00
	[#] Belanja Uang Transport Dalam Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.500.000,00
	[-] Uang Transport					Rp. 2.500.000,00
	Belanja Uang Transportasi Dalam Kota Spesifikasi : Uang Transportasi dalam Kota	50	Orang / Hari	50.000,00	0 %	Rp. 2.500.000,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp. 6.210.000,00
	[#] Bimtek Pengelolaan Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.210.000,00
	[-] Paket Meeting					Rp. 6.210.000,00
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Eselon II (Half Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	30	Orang / Kali	207.000,00	0 %	Rp. 6.210.000,00
Jumlah :						Rp. 237.891.092,00
Kota Bontang..... Kepala Badan Pendapatan Daerah AP  SYAHRUDDIN, SE, M.A.M.Eng NIP. 197402102005021001						

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
----	------	-----	---------	--------------